“KONSEP”

PAPARAN UNTUK RAPAT KOORDINASI NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

AGENDA

- Pendahuluan…….. 3
- Tugas Fungsi Ditjen PPI…….. 4
- Penyusunan Program Prioritas Ditjen PPI…. 5
- Isu-Isu Strategis Industri…… 6
- Rencana Pita Lebar Indonesia…… 7
- Program Prioritas Ditjen PPI 2015-2016……. 8
- Program Redesain USO…….. 27

Pendahuluan - LATAR BELAKANG

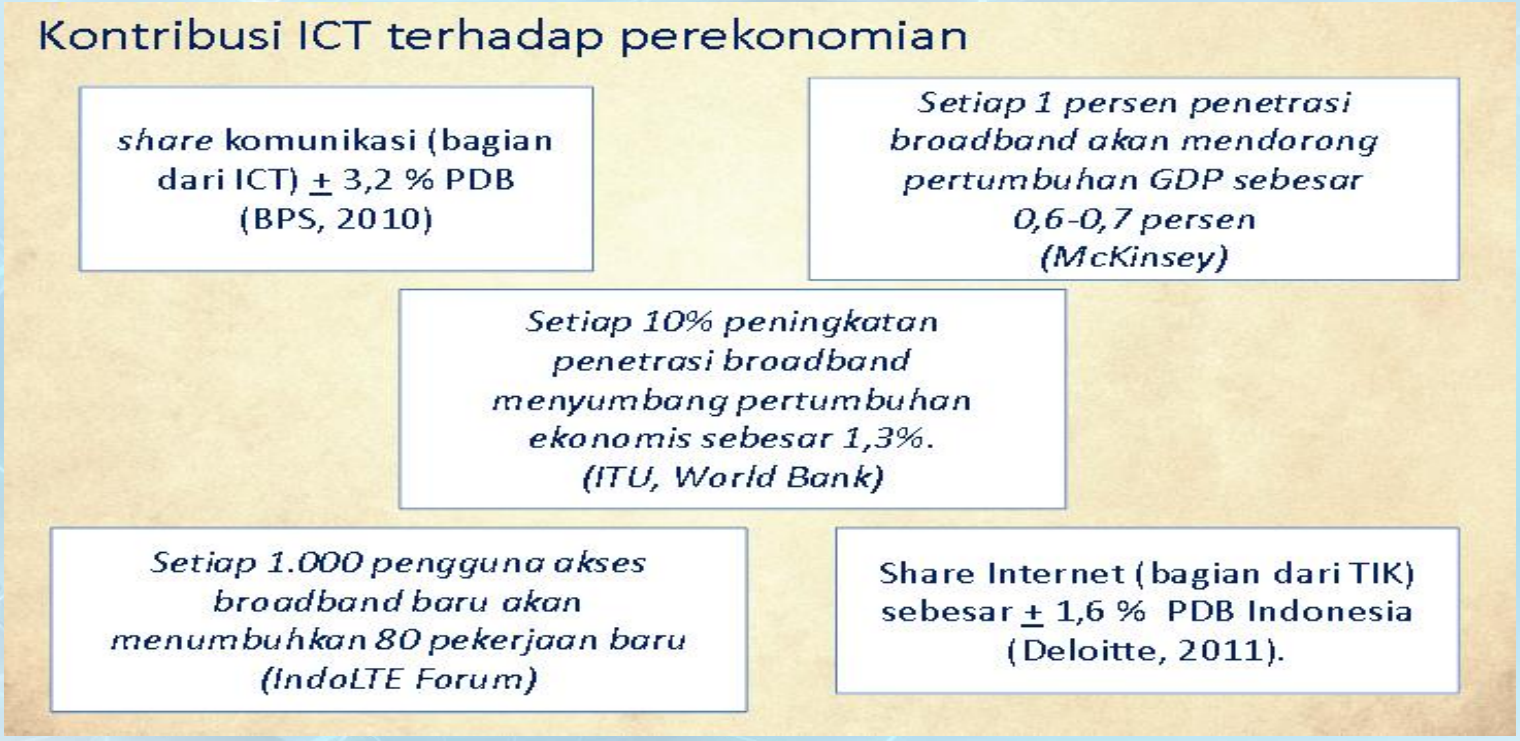

- Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan ekosistem nasional TIK.
- Ditjen PPI memiliki tugas pokok menjamin kelancaran penyediaan layanan pos dan informatika melalui kerangka regulasi dan kebijakan yang mendukung.
- Pemerintah melalui RPJMN 2015-2019 menekankan bagaimana fungsi TIK sangat berperan dalam kemajuan bangsa Indonesia melalui dukungannya terhadap sektor politik, perekonomian, budaya, Pertahanan dan keamanan, serta sektor-sektor strategis lainnya.
- Peran TIK yang sangat luas ini menjadi tantangan bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyusun rencana dan program-program yang berkaitan dengan peran dan tanggung-jawab Kominfo.

TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PPI (BERDASARKAN PERPRES NOMOR 54 TAHUN 2015)

TUGAS :

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika.

FUNGSI :

a. Perumusan kebijakan di bidang standardisasi layanan, pelayanan perizinan serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas dan keamanan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan infrastruktur dan ekosistem penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi layanan, pelayanan perizinan serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas dan keamanan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan infrastruktur dan ekosistem penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan perizinan serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas dan keamanan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan infrastruktur dan ekosistem penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan perizinan serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas dan keamanan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan infrastruktur dan ekosistem penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika;
f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

PENYUSUNAN PROGRAM PRIORITAS DITJEN PPI

Assessment Industry

Bidang Telekomunikasi

Bidang Pos

Bidang Penyiaran

Isu-isu Strategis Industri

Target dan Kebijakan Pemerintah

- RPJPN 2005 – 2025
- Nawa Cita
- RPJMN 2015-2019
- Rumah Transisi
- RPI
- TUSI
- **Directive Menteri**

Isu-isu Strategis Pemerintah

Gap Analisis
- Bisnis
- Teknis
- Regulasi

Analisis
- Potensi
- Permasalahan

Isu-isu Strategis Ditjen PPI

- Bidang Telekomunikasi
- Bidang Pos
- Bidang Penyiaran

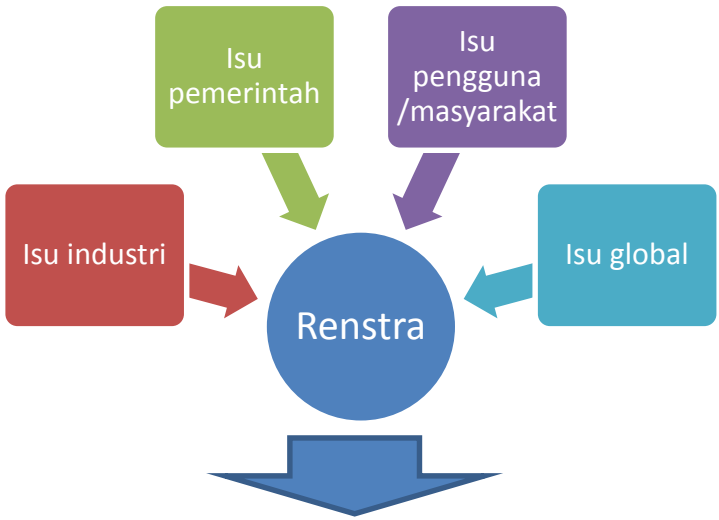

Harmonisasi lintas sektor
- Leading sector
- Supporting sector

Penyusunan Renstra Ditjen PPI

- Visi
- Misi
- Sasaran Strategis
- Program Prioritas
- Arah Kebijakan dan Strategi
- Rencana Implementasi

ISU-ISU STRATEGIS INDUSTRI

Globalisasi

- Interkoneksi dan interdependensi dunia meningkat
- Borderless antar Negara
- Perubahan teknologi yang cepat

SDM

- Capacity building
- Revolusi mental
- E-literasi

Digitalisasi

- Industri digital meningkat
- E-government, e-education, e-procurement, , e-health, e-banking, E-book , e-learing, e-shopping, e-commerce, e-money, dll.
- Game online, social media, e-mail, youtube, dll.
- Financial Inclusion

Perbatasan

- Terbatasnya Akses informasi
- Terbatasanya sarana dan prasarana
- Ancaman dari Negara Tetangga

Konvergensi

- Konvergensi layanan
- Konvergensi infrastruktur dan Jaringan
- Konvergensi social dan budaya, dll.

Protection

- Perlindungan konsumen
- Cyber security
- Government network

Konektivitas

- Pembangunan Infrastrukur
- Kesenjangan Urban dan Rural
- Konektivitas Broadband

- Industri yang Ideal
- Persaingan Industri
- Konsolidasi Industri
- Merger & Akuisisi
- Efisiensi Industri

KOMINFO

Arah dan Kebijakan Pemerintah – **Rencana Pita Lebar Indonesia (RPI)**

- Arah kebijakan dan strategi utama sector telekomunikasi adalah mewujudkan rencana pita lebar Indonesia (RPI)

2013

2019

Infrastruktur
Fixed broadband :
15% rumah tangga(1Mbps) , 30% gedung (100 Mbps), dan 5% populasi;
Mobile broadband :
12% populasi (512 kbps)

Infrastruktur Urban:
Fixed broadband :
71% rumah tangga (20Mbps), 100% gedung (1 Gbps), dan 30% populasi;
Mobile broadband :
100% populasi (1 Mbps)

Infrastruktur Rural:
Fixed broadband :
49% rumah tangga(10Mbps) dan 6% populasi;
Mobile broadband :
52% populasi (1 Mbps)

Prioritas Utilisasi/Adopsi:
e-Government; e-pendidikan; e-kesehatan; e-logistik, *e-procurement*

Pengguna/Penerima Manfaat: Masyarakat Indonesia
potential captive market: 4,5 juta PNS, 50 juta pelajar, 5 juta pendidik, 60 juta rumah tangga

KOMINFO

PROGRAM PRIORITAS DITJEN PPI 2015-2016

Program Utama Kemenkominfo

Berdasarkan nawacita dan agenda pembangunan nasional yang memberikan manfaat signifikan bagi rakyat dan negara

A

B

C1

Program Legislasi Nasional (RUU)

- RUU Revisi atas UU 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- RUU Tentang Radio Televisi Republik Indonesia
- RUU Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

C2

Program Internal Kominfo terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental

Program-program diatas merupakan program utama Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendukung fokus pembangunan nasional. Program-program lain diluar program utama diatas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika

EVALUASI PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

NO.	PROGRAM KERJA	SASARAN PROGRAM	UNIT KERJA	2015						HAMBATAN
				Q1 / M3	Q2 / M6	END Q1		Q3 / M9		
				TARGET	TARGET	CAPAIAN & GAP	Tindak lanjut sblm 30 JUNI	TARGET	ESTIMASI PENCAPAIAN	
A	**Program Kerja Kemenkominfo Berdasarkan Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia**									
1	Penyediaan 125 BTS	Mengatasi digital divide di daerah Tertinggal, Terluar dan Terpencil	PPI	• Penyusunan bisnis model redisain USO • Pelaksanaan PKS pihak-pihak terkait (Kominfo, Pemda & Operator) • Survey Penetapan lokasi	• bisnis model redisain USO dan dimasukkan dalam Rancangan Permen Redisain USO yang sedang diuji publik dan PKS • Draft PKS antara Kominfo, Pemda dan operator akan difinalisasi sesuai dengan pemilihan lokasi yang telah disampaikan operator (PT.Hutchitson, PT.Indosat, PT.XL danPT.Telkomsel). • Jumlah lokasi usulan dari pemda yang siap untuk disurvey 312 Terdiri dari 31 sudah memiliki tower dan 281 Lokasi sudah mendapatkan komitmen lahan dari pemerintah daerah • 31 tower ready terdiri dari 17 lokasi tower Pos Pantas yang peruntukkannya untuk lalulintas perbatasan dan 14 lokasi usulan Pemda	• Percepatan Penandatanganan sisa PKS	Pembangunan tower dan sarana catu daya	Tercapai	Ketersediaan bandwidth VSAT untuk akses link BTS Kebijkakan untuk menetapkan single/multi operator dalam satu kawasan

EVALUASI PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

NO.	PROGRAM KERJA	SASARAN PROGRAM	UNIT KERJA	2015						HAMBATAN
				Q1 / M3	Q2 / M6	END Q1		Q3 / M9		
				TARGET	TARGET	CAPAIAN & GAP	Tindak lanjut sblm 30 JUNI	TARGET	ESTIMASI PENCAPAIAN	
A	**Program Kerja Kemenkominfo Berdasarkan Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia**									
2	Sistem desa broadband terpadu untuk rakyat sesuai nawa cita	- Tersedianya infrastruktur dan akses layanan akses informasi di wilayan non komersial - Tersedianya sistem desa broadband terpadu untuk rakyat sesuai nawa cita	PPI	• Pelaksanaan MoU dan PKS dengan K/L terkait dan Pemda • Pelaksanaan survei user need untuk 3 tipikal area (Desa Nelayan, Desa Pertanian, Desa Pedalaman)		• Tandatangan PKS 1.Ditjen PPI dengan Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 2.Ditjen PPI dan Ditjen Bina Lattas Kemenakaer pada tanggal 20 Mei 2015. • Finalisasi Draft PKS dengan 5 K/L lainnya : Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Kesehatan • Sedang disusun draf MoU dengan UI (Puskakom) • Puskakom UI sedang melakukan suvey/penelitian Ekologi Komunikasi Masyarakat Petani, Nelayan dan Pedalaman di P. Seram bagian barat, Timor tengah utara, dan Malinau Kaltara. Puskakom UI sedang melakukan suvey/penelitian Ekologi Komunikasi Masyarakat Petani, Nelayan dan Pedalaman di P. Seram bagian barat, Timor tengah utara, dan Malinau Kaltara. • Hasil survey akan menjadi masukan atau referensi untuk membangun aplikasi generic untuk kebutuhan Desa Nelayan, Desa Pertanian dan Desa Pedalaman	Mempercepat PKS dan MoU dengan UI	Penyiapan aplikasi generic untuk kebutuhan Desa Nelayan, Desa Pertanian dan Desa Pedalaman	Tercapai	Lambatnya respon dari K/L untuk menetapkan usulan lokasi prioritas

EVALUASI PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

NO.	PROGRAM KERJA	SASARAN PROGRAM	UNIT KERJA	2015						HAMBATAN
				Q1 / M3	Q2 / M6	END Q1		Q3 / M9		
				TARGET	TARGET	CAPAIAN & GAP	Tindak lanjut sblm 30 JUNI	TARGET	ESTIMASI PENCAPAIAN	
A	**Program Kerja Kemenkominfo Berdasarkan Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia**									
3	Penyediaan Akses Internet di 800 titik lokasi	Tersedianya infrastruktur dan akses layanan akses informasi di wilayan non komersial	PPI	• Pelaksanaan MoU dan PKS dengan K/L terkait dan Pemda • Usulan lokasi untuk survey penyediaan akses internet di 800 lokasi dari Ditjen PPI ke BP3TI	• Tandatangan PKS 1.Ditjen PPI dengan Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 2.Ditjen PPI dan Ditjen Bina Lattas Kemenakaer pada tanggal 20 Mei 2015. • Finalisasi Draft PKS dengan 5 K/L lainnya : Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Kesehatan • Hasil usulan lokasi sebagai berikut: 1. Ditjen KP3K, Kemen KKP, menunggu usulan lokasi; 2. Kemenkes mengusulkan 124 lokasi, dialokasikan 80 lokasi; 3. Pustekom Kemendiknas mengusulkan 10.473 lokasi sekolah, dialokasikan 230 lokasi; 4. BIN, mengusulkan 30 lokasi dan dialokasikan 10 lokasi (10 lokasi beririsan dengan lokasi perbatasan); 5. Kemenpera dan PU, merekomendasikan 425 titik Rusunawa dan dialokasikan 40 titik; 6. Pemda mengusulkan 1.175 lokasi dan dialokasikan 240 lokasi 7. Kemenaker mengusulkan 276 lokasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan dialokasikan 40 lokasi 8. Kementan mengusulkan 5.849 titik, dan dialokasikan 120 titik Balai Karantina Pertanian dan Badan Penyuluhan Pertanian … (BP3K)	Mempercepat PKS dan MoU dengan K/L terkait Bila K/L belum siap maka penyediaan akses internet broadband akan difokuskan ke usulan Kemendiknas untuk mendukung program e-sabak 1000 sekolah	• Pelaksanaan survey • Kontrak Penyedia Jasa internet	Tercapai	Kesiapan utilisasi dan perangkat pendukung

EVALUASI PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

NO.	PROGRAM KERJA	SASARAN PROGRAM	UNIT KERJA	2015						HAMBATAN
				Q1 / M3	Q2 / M6	END Q1		Q3 / M9		
				TARGET	TARGET	CAPAIAN & GAP	Tindak lanjut sblm 30 JUNI	TARGET	ESTIMASI PENCAPAIAN	
B	**Program Kerja Kemenkominfo sebagai leading sektor**									
4.	Jaringan tulang punggung serat optik nasional (Palapa Ring)	Tersedianya Tulang Punggung untuk terselenggaranya Koneksi Broadband di Seluruh Kabupaten/Kota	PPI	• Persiapan & Pendampingan (Consultation & Guidance) Penyiapan Proyek • Proses Appraisal (terkait pra-FS & Rancangan kontrak) • 2. Konsultasi pasar dan usulan penjaminan • 3. Finalisasi dokumen persyaratan & peserta lelang dan bisnis model	1. Telah dilakukan persiapan dan pendampingan (Consultation & Guidance) Penyiapan Proyek melalui 3 (tiga) kali rapat FGD. 2. Dalam rangka usulan penjaminan telah dilakukan persiapan melalui rapat Capacity Building dengan PT. PII 3. Telah dilakukan proses screening untuk mengidentifikasi kesiapan proyek untuk KPS. Tindak lanjut dari proses screening, PT. PII akan menerbitkan Confirmation To Proceed (CTP) 4. Persiapan Pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan Konsultan Transaksi dalam rangka : - Persiapan dokumen pra feasibility study (FS) - Izin prinsip Viagibility Gap Funding (VGF) dari Kemenkeu	• Koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan surat Menkominfo ke Menkeu • Revisi anggaran untuk konsultan transaksi	1. Finalisasi Perjanjian Penjaminan (Structuring), dan menyepakati Perjanjian Regres 1. Finalisasi dokumen lelang untuk kontrak kerjasama & Penjaminan 3. Proses Lelang	- Tercapai bila persetujuan Menkeu sesuai jadwal	• Surat persetujuan penggunaan dana USO untuk Palapa Ring oleh Menkeu • Surat persetujuan Palapa Ring dari Menkeu sebagai proyek Public Private Partnership (PPP) dengan Availability Payment (AP)

EVALUASI PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

NO.	PROGRAM KERJA	SASARAN PROGRAM	UNIT KERJA	2015						HAMBATAN
				Q1 / M3	Q2 / M6	END Q1		Q3 / M9		
				TARGET	TARGET	CAPAIAN & GAP	Tindak lanjut sblm 30 JUNI	TARGET	ESTIMASI PENCAPAIAN	
B	**Program Kerja Kemenkominfo sebagai leading sektor**									
5.	Passive Infrastructure sharing	- Terciptanya efisiensi infrastruktur nasional - Terdistribusinya pendapatan sektor telekomunikasi ke daerah-daerah - Mendukung pengembangan Smart Cities	PPI	Persiapan penetapan lokasi survei 3 kota untuk pengembangan infrastruktur pasif		1. Tahap rapat persiapan penentuan lokasi dan masuk pembahasan model binis yang sudah dilaksanakan BPPPTI. 2. Koordinasi dengan Pemda terkait usulan yang sudah diajukan 3. Kandidat 3 (tiga) Kab/Kota untuk pembangunan Passive Infrastructure sharing adalah: Malang, Bogor, Bandung	Penetapan lokasi survei 3 kota	Pelaksanaan survei dan detail engineering design infrastruktur	Tercapai	Kesiapan dan komitmen Pemda

EVALUASI PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

NO.	PROGRAM KERJA	SASARAN PROGRAM	UNIT KERJA	2015						HAMBATAN
				Q1 / M3	Q2 / M6	END Q1		Q3 / M9		
				TARGET	TARGET	CAPAIAN & GAP	Tindak lanjut sblm 30 JUNI	TARGET	ESTIMASI PENCAPAIAN	
B	**Program Kerja Kemenkominfo sebagai leading sektor**									
6.	Konsolidasi Telco Operator	- Terwujudnya industri digital Indonesia yang kuat dan mampu bersaing dengan industri digital global - Terjadinya efisiensi industri Peningkatan kualitas layanan Keterjangkauan harga layanan broadband (maksimal 5% dari Upah Minimum Regional (UMR))	PPI	Pengumpulan materi dan penyusunan draft awal Regulasi Konsolidasi dan restrukturisasi industri telekomunikasi terkait: a. Infrastruktur sharing b. Right of Way c. Infrastruktur Pasif d. Open Akses e. Partnership (Kemitraan Layanan) f. Merger Akuisisi konsolidasi Spin off g. Perbaikan tata niaga jaringan dan jasa telekomunikasi	1. Untuk infrastruktur sharing telah dilakukan finalisasi penyusunan draft dengan stakeholder sebelum dilakukan uji publik 2. Untuk Right of Way telah dilakukan finalisasi penyusunan draft dengan stakeholder sebelum dilakukan uji publik 3. Untuk infrastruktur pasif telah dilakukan finalisasi penyusunan draft dengan stakeholder sebelum dilakukan uji publik 4. Untuk open akses telah dilakukan finalisasi penyusunan draft dengan stakeholder sebelum dilakukan uji publik 5. Untuk Partnership (Kemitraan Layanan) telah dilakukan finalisasi penyusunan draft dengan stakeholder sebelum dilakukan uji publik 6. Untuk Merger, akuisisi, konsolidasi, spin off sedang dalam proses finalisasi draft RPM oleh Bagian Hukum Ditjen PPI 7. Untuk Perbaikan tata niaga jaringan dan jasa telekomunikasi, Draft akhir RPM Jaringan dan Jasa telah disampaikan ke Bag. Hukum Ditjen PPI dan Bagian Hukum sedang melakukan finalisasi draft Permen tersebut.	Penyusunan Naskah Akademis sebagai dasar penyusunan regulasi	Pembahasan draft RPM dengan stakeholders dan satker lain	Tercapai	Belum ada

EVALUASI PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

NO.	PROGRAM KERJA	SASARAN PROGRAM	UNIT KERJA	2015						HAMBATAN
				Q1 / M3	Q2 / M6	END Q1		Q3 / M9		
				TARGET	TARGET	CAPAIAN & GAP	Tindak lanjut sblm 30 JUNI	TARGET	ESTIMASI PENCAPAIAN	
B	**Program Kerja Kemenkominfo sebagai leading sektor**									
7.	Nomor panggilan tunggal darurat nasional (single emergency call)	- Mengatasi kesimpangsiuran nomor panggilan untuk setiap jenis keadaan darurat - Memberikan kemudahan masyarakat dalam mengahadapi keadaan darurat - Meningkatkan kualitas layanan publik di kabupaten/ kota	PPI	1. Penyiapan konsep pelaksanaan nomor panggilan tunggal darurat nasional 2. Sosialisasi pihak-pihak terkait (Pemda, Kepolisian, Unit Gawat Darurat, Operator, Damkar)		Telah dilakukan rapat dan audiensi pada tanggal 29 Mei 2015 dalam rangka Kajian Layanan Nomor Tunggal untuk Panggilan Darurat di Kantor Pusat PT INTI, Bandung. Pada rapat tersebut membahas tentang: 1. Rekomendasi PT INTI tentang sistem Layanan Nomor Tunggal untuk Panggilan Darurat. PT INTI mengajukan usulan seputar: a. Kelengkapan Command and Data Center Layanan Nomor Tunggal untuk Panggilan Darurat b. Platform dan Aplikasi yang dapat diterapkan pada Layanan Nomor Tunggal untuk Panggilan Darurat c. Format dan Pendukung untuk SDM Call Center Layanan Nomor Tunggal untuk Panggilan Darurat 2. Harapan Pemerintah kepada stackholder lokal untuk dapat berpartisipasi dalam pengadaan Layanan Nomor Tunggal untuk Panggilan Darurat.	-	Pelaksanaan di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota percontohan	-	Kesiapan dan komitmen Pemda

EVALUASI PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

NO.	PROGRAM KERJA	SASARAN PROGRAM	UNIT KERJA	2015						HAMBATAN
				Q1 / M3	Q2 / M6	END Q1		Q3 / M9		
				TARGET	TARGET	CAPAIAN & GAP	Tindak lanjut sblm 30 JUNI	TARGET	ESTIMASI PENCAPAIAN	
B	**Program Kerja Kemenkominfo sebagai leading sektor**									
8.	Penataan registrasi kartu pra bayar	- Mencegah kebocoran keuangan negara (kerugian operator telekomunikasi IDR 1,2 T/tahun akibat Refiling Trafik Terminasi Internasional (RTTI) dan inefisiensi sebesar USD 200 Juta) - Mencegah spam dan fraud layanan telekomunikasi (intangible loss bagi publik)	PPI	Penyempurnaan tata cara registrasi dan aktivasi kartu perdana prabayar		Telah dilakukan penyusunan draft RPM terkait kartu perdana dan starter kit, saat ini sedang menunggu masukan dari KRT BRTI Baru	-	Penataan tata niaga distribusi kartu perdana pra bayar	Tercapai	

EVALUASI PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

NO.	PROGRAM KERJA	SASARAN PROGRAM	UNIT KERJA	2015						HAMBATAN
				Q1 / M3	Q2 / M6	END Q1		Q3 / M9		
				TARGET	TARGET	CAPAIAN & GAP	Tindak lanjut sblm 30 JUNI	TARGET	ESTIMASI PENCAPAIAN	
B	Program Kerja Kemenkominfo sebagai leading sektor									
9.	Penataan registrasi IMEI untuk perangkat	- Mencegah kebocoran keuangan negara akibat pasar gelap perangkat. Meningkatkan ekonomi nasional karena mengurangi pendapatan negar dari ilegal market (yang disinyalir nilai black market handset handphone ini lebih dari 30% pangsa pasar Handpone sellular di Indonesia dan berpotensi kehilangan Income Tax sampai 5T rupiah) - Melindungi publik dari penggunaan perangkat yang tidak sesuai ketentuan	SDPPI & PPI	1. Koordinasi K/L terkait 2. Perumusan strategi/kebijakan penataan registrasi IMEI untuk perangkat 3. Penyusunan Regulasi		Dalam proses pengidentifikasian masalah	Akan dilaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan kementerian perdagangan, perindustrian dan dit. Standarisasi SDPPI	Penyusunan Regulasi	Tercapai	Penetapan leading sector apakah Ditjen PPI atau Ditjen SDPPI -

EVALUASI PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015

NO.	PROGRAM KERJA	SASARAN PROGRAM	UNIT KERJA	2015						HAMBATAN
				Q1 / M3	Q2 / M6	END Q1		Q3 / M9		
				TARGET	TARGET	CAPAIAN & GAP	Tindak lanjut sblm 30 JUNI	TARGET	ESTIMASI PENCAPAIAN	
B	**Program Kerja Kemenkominfo sebagai leading sektor**									
10.	Digitalisasi Telivisi	-Tercapainya efisiensi penggunaan spektrum frekuensi (digital dividend) -Terciptanya efisiensi infrastruktur industri penyiaran -Terbukanya peluang usaha baru bagi penyedia konten -Terciptanya diversity of ownership and diversity of contents -DIGITAL TV SWITCHOVER Penghematan biaya listrik sebesar 94%, biaya Capex sebesar79% dan biaya Opex sebesar 57% dibandingkan tetap menggunakan pemancar TV analog kualitas penerimaan siaran meningkat, kualitas layanan lebih baik (HDTV), jumlah program siaran TV bertambah dibandingkan dengan lingkungan TV Analog.	SDPPI & PPI	Koordinasi K/L Menuju Penghentian Penjualan TV Baru selain DVB-T2 Ready		1. Sudah mengajukan permohonan banding terkait putusan PTUN 2. Sudah disusun memori banding 3. Telah dilaksanakan pertemuan antara Dirjen PPI dengan operator Mux TV digital terkait tindaklanjut implementasi TV digital pasca banding terhadap putusan PTUN	Koordinasi dengan K/L terkait	1.Sosialisasi dan kampanye TV Digital 2.Persiapan regulasi TV DVB-2 Ready	-	Belum ada

EVALUASI PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN

NO.	PROGRAM KERJA	SASARAN PROGRAM	UNIT KERJA	2015						HAMBATAN
				Q1 / M3	Q2 / M6	END Q1		Q3 / M9		
				TARGET	TARGET	CAPAIAN & GAP	Tindak lanjut sblm 30 JUNI	TARGET	ESTIMASI PENCAPAIAN	
C	**Program Legislasi Nasional – RUU Tentang Perubahan atas :**									
11.	RUU tentang penyiaran	- Terwujudnya prinsip diversity of content and diversity of ownership - Terselenggaranya industri penyiaran yang sehat - Tersedianya konten siaran yang sesuai dengan karakter bangsa	PPI	Terwujudnya partisipasi publik dan seluruh stakeholder dalam penyusunan dan pembahasan RUU Penyiaran		1.Telah dilakukan koordinasi dengan Tim Asistensi/Tenaga Ahli Komisi I DPR-RI untuk pembahasan kerangka pikir Draft RUU Perubahan UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 2. Telah dilakukan pembahasan usulan staf ahli Komisi 1 DPR-RI pada tanggal 8 Mei 2015 terkait dengan cluster RUU Penyiaran. Hasil paparan staf ahli Komisi I DPR-RI dimaksud telah ditanggapi oleh Pemerintah/Kemkomino	-	Terwujudnya partisipasi publik dan seluruh stakeholder dalam penyusunan dan pembahasan RUU Penyiaran	-	-
12.	RUU tentang Radio Televisi RI	- Tercapainya efisiensi sarana & prasarana lembaga penyiaran publik - Terwujudnya lembaga penyiaran publik yang kuat, sebagai penyeimbang informasi dan penguatan National Character Building	PPI	Terwujudnya partisipasi publik dan seluruh stakeholder dalam penyusunan dan pembahasan RUU RTRI		Belum ada draft RUU dari inisiator RUU RTRI yaitu Komisi I DPR-RI, sehingga belum ada pembahasan	-	Terwujudnya partisipasi publik dan seluruh stakeholder dalam penyusunan dan pembahasan RUU RTRI	-	-

KEBIJAKAN MENKOMINFO UNTUK PENYUSUNAN RENSTRA 2016

Program Kerja (Proker) Unit Eselon I yang diusulkan untuk tahun 2016

Usulan Proker

Koridor penyusunan Program Kerja Tahun 2016

1. Kelanjutan Program Renstra 2015 (hanya yang termasuk dalam PK 2015 yang di ttd eselon I dengan Menkominfo)
2. Pemantapan dari program utama yang mendukung fokus program pemerintah
3. Pemantapan dari program utama sebagai leading sektor
4. Rumah transisi
5. Tugas dan Fungsi Pokok Kominfo yang mendukung trisakti dan nawacita
6. Tindak Lanjut temuan BPK (C2)

Proses Filtering/ Dropping Proker

Proker terpilih

PROGRAM KERJA TERPILIH UNTUK RENSTRA TAHUN 2016

Program Utama Kemenkominfo

Berdasarkan nawacita dan agenda pembangunan nasional yang memberikan manfaat signifikan bagi rakyat dan negara

A

B

- Broadband/ 4G
- Efisiensi Industri
- Cyber Security & Governance
- E-Government
- E-Commerce
- Digitalisasi

C1 Program Legislasi Nasional (RUU) *Sumber: DPR RI*

C2 Program Internal Kominfo terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental

Planning | Design | Implement | Monitoring/ evaluation

Public Participation

A Program Kominfo Untuk Mendukung Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia

PROGRAM PRIORITAS DITJEN PPI 2016

#1 KONEKTIVITAS NASIONAL (USO)

- Menyediakan program pendukung sistem desa broadband terpadu (sesuai prioritas)
- Membangun 75 BTS di daerah tertinggal, terluar dan terpencil
- Menyediakan akses internet di 800 lokasi sistem desa broadband (desa nelayan, pertanian dan pedalaman)
- Menyediakan akses broadband internet di 10 Rusunawa
- Membangun 50 tugu berkode pos sebagai tanda batas wilayah kedaulatan RI di daerah perbatasan dan pulau terdepan
- Revitalisasi infrastruktur dan meningkatkan kualitas siaran Penyiaran Publik di 36 lokasi IITS-Phase II

#2 KONEKTIVITAS NASIONAL NON USO (EKOSISTEM)

- Koordinasi lokasi prioritas dengan K/L terkait dengan penyelenggara telekomunikasi
- Membuat kebijakan kepada operator untuk memusatkan pengembangannya ke lokpri sektor unggulan sesuai model
- Memfasilitasi dan memonitor implementasi

B Program Kerja Kemenkominfo sebagai *Leading Sector*

PROGRAM PRIORITAS DITJEN PPI 2016

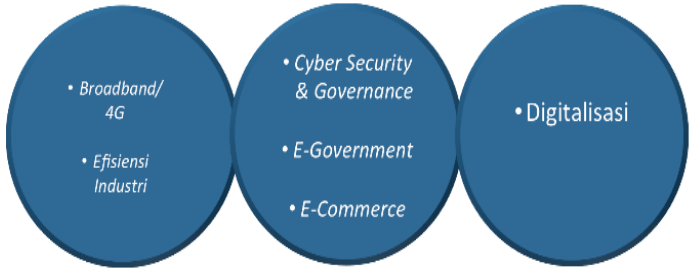

#1 BROADBAND INFRASTRUCTURE

- Tercapainya penetrasi fixed broadband menjadi 40%-75% rumah tangga dengan kecepatan 2 Mbps, 50%-80% gedung dengan kecepatan 1 Gbps dan 25% populasi, dan penetrasi internet mobile broadband menjadi 75% populasi sebesar 1 Mbps

Palapa Ring

- Melanjutkan penggelaran jaringan kabel fiber optik s.d 51 kab/kota di 2019

#2 EFISIENSI INDUSTRI

Konsolidasi Telco

- Implementasi roadmap industri digital

Passive Infrastructure Sharing

- pembangunan infrastruktur pasif di **2 kota** terpilih

Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

- Pengawasan dan evaluasi kebijakan TKDN 20% dan 30%, sebagai persiapan implementasi kebijakan TKDN 30% dan 40%

#3 SINGLE EMERGENCY NUMBER

- Implementasi nomor panggilan tunggal darurat (*single number emergency call*) di **10 kab / kota.**

#4 PENATAAN REGISTRASI PRABAYAR

- Monitoring kepatuhan dan penegakan hukum hasil penataan registrasi kartu pra bayar

#5 REGISTRASI IMEI

- Monitoring kepatuhan dan penegakan hukum registrasi IMEI

KOMINFO

B Program Kerja Kemenkominfo sebagai *Leading Sector*

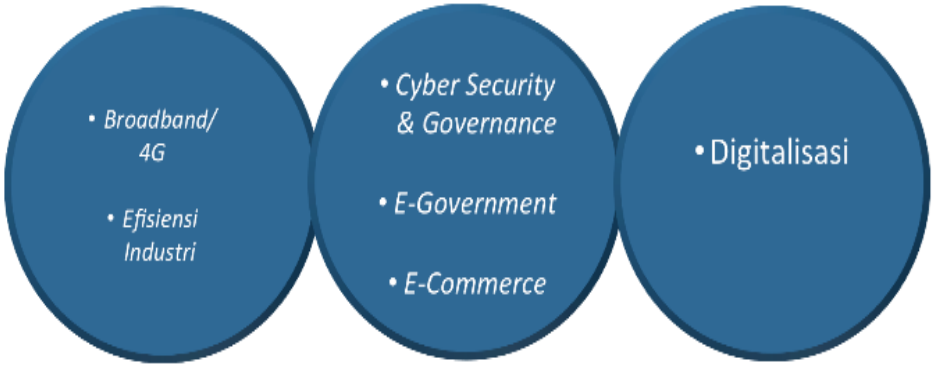

#1 **DIGITALISASI**

DIGITALISASI

- ❑ Menyusun kebijakan/regulasi percepatan migrasi TV analog ke digital.
- ❑ Memastikan migrasi TV analog ke digital selesai sesuai jadwal *switch off* (2018).
- ❑ Mendorong percepatan revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang merupakan inisiatif DPR.

PROGRAM PRIORITAS DITJEN PPI 2016

C1

Program Legislasi Nasional (RUU) Tahun 2016
- RUU Telekomunikasi
- RUU Revisi atas UU 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- RUU Tentang Radio Televisi Republik Indonesia
- RUU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos

#1 RANCANGAN UU Telekomunikasi

❑Usulan Pendaftaran dalam Prolegnas Prioritas

#2 UU 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

- ❑ Lanjutan pembahasan DIM dengan melibatkan partisipasi publik dan seluruh stakeholder sebagai bahan pembahasan dengan DPR.
- ❑ Menyusun UU Pelaksana turunan.

#3 RUU TENTANG RADIO TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (RTRI)

- ❑ Lanjutan pembahasan DIM dengan melibatkan partisipasi publik dan seluruh stakeholder sebagai bahan pembahasan dengan DPR.
- ❑ Menyusun UU Pelaksana turunan

#4 RUU NO. 38 TAHUN 2009 TENTANG POS

❑Usulan Pendaftaran dalam Prolegnas Prioritas

KOMINFO

PROGRAM PRIORITAS DITJEN PPI 2016

C2

Program Internal Ditjen PPI terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental

#1 **CHANGE MANAGEMENT**

- Mempercepat proses perizinan di lingkungan Kemkominfo melalui Elicensing perizinan Pos dan Telekomunikasi
- Partisipasi publik dalam pengawasan program Ditjen PPI melalui website

#2 **PENDUKUNG**

- Pengawalan terhadap proses pengadaan.
- Review atau evaluasi atas pengelolaan PNBP dan perizinan.
- Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal.

KOMINFO

PROGRAM REDESAIN USO

KONSEP REDESAIN USO

BOTTOM UP	Program disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan masyarakat
KOMPREHENSIF	tidak hanya infrastruktur namun juga mencakup ekosistem (pemberdayaan masyarakat, konten, aplikasi, dll) untuk meningkatkan tilisasi infrastruktur.
PILOTING	Program bersifat cluster (tidak seragam secara nasional) sesuai dengan kondisi dan kesiapan masing-masing daerah untuk mempermudah kontrol.
SINERGIS	Melibatkan stake holder dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk memastikan sinergitas program dengan pihak terkait.

STAKE HOLDER

Dalam pelaksanaan redesign program KPU/USO terdapat 4 (empat) Stake Holder (pihak terkait) yang menjadi pertimbangan dalam melaksanakan program/kegiatan (Bottom up), yaitu :

1. Pemerintah Daerah;
2. Kementerian/Lembaga;
3. Operator Telekomunikasi;
4. Kelompok Masyarakat (LSM, Organisasi Kemasyarakatan,dll).

SASARAN PROGRAM USO

DIGITAL DIVIDE

a. Memperluas coverage (akses) layanan telekomunikasi dan informasi untuk mengurangi kesenjangan digital antar wilayah di Indonesia

b. Clustering sesuai kondisi, dan kebutuhan daerah.

c. Survey untuk mengetahui tingkat kesenjangan digital masing-masing daerah.

d. Bekerjasama dengan Pemda , Operator , dan K/L yang

SUPORTING INDUSTRI

a. Menyediakan *common infrastructure* yang menjadi sarana kompetisi bersama bagi industri untuk mendorong efisiensi industri

b. Memperluas pasar (create demand)

c. Mengukur Kesiapan dan dukungan stake holder

d. Memperluas pemanfaan dan ketahanan informasi masayarakat.

KOMINFO

Identifikasi kondisi supply – demand dan rekomendasi cluster program KPU/USO

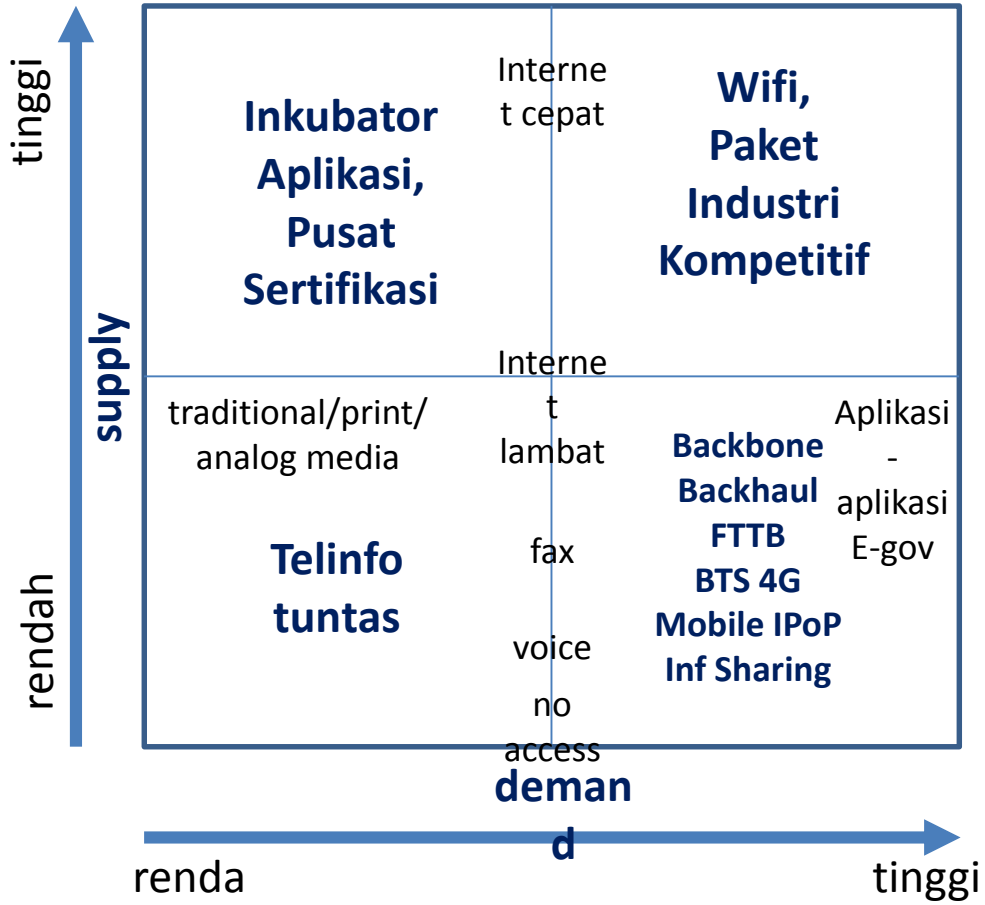

KOMINFO

Posisi Daerah

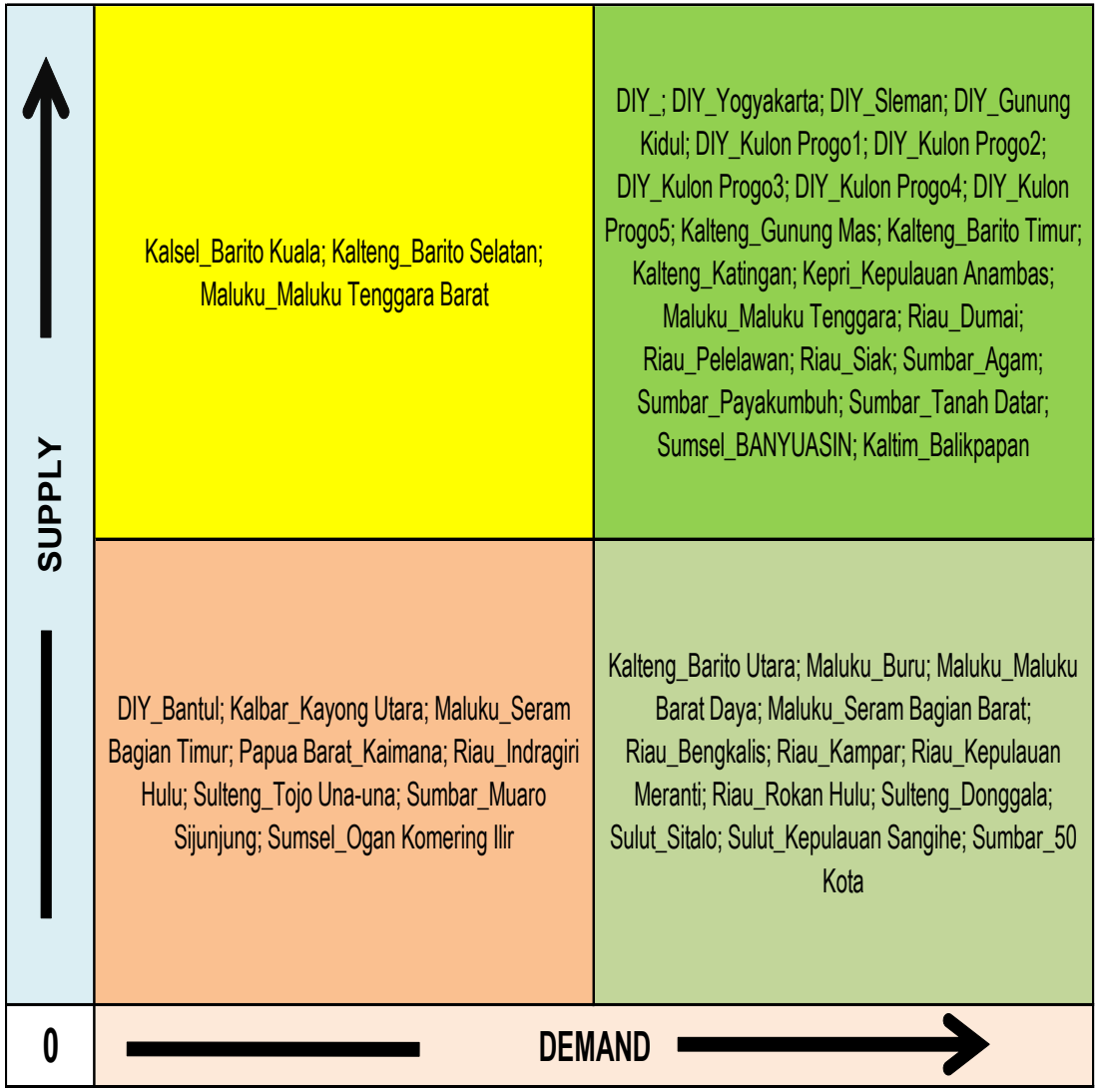

KOMINFO

Hasil Perhitungan Prioritas

Perhitungan Prioritas Program KPU /USO Telekomunikasi

No	Identitas Pengusul			Bobot Rerata	Prioritas
	Provinsi	Kabupaten/kota	Prov_Kab		
18	Riau	Kampar	Riau_Kampar	0,76	I
11	Maluku	Maluku Barat Daya	Maluku_Maluku Barat Daya	0,74	I
26	Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara_Kepulauan Sangihe	0,73	I
2	Kalimantan Tengah	Gunung Mas	Kalimantan Tengah_Gunung Mas	0,72	I
7	Kepulauan Riau	Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau_Kepulauan Anambas	0,72	I
13	Maluku	Seram Bagian Timur	Maluku_Seram Bagian Timur	0,67	I
30	Sumatera Barat	Payakumbuh	Sumatera Barat_Payakumbuh	0,66	I
35	Kalimantan Selatan	Barito Kuala	Kalimantan Selatan_Barito Kuala	0,65	II
33	SUMATERA SELATAN	Ogan Komering Ilir	SUMATERA SELATAN_Ogan Komering Ilir	0,65	II
32	SUMATERA SELATAN	BANYUASIN	SUMATERA SELATAN_BANYUASIN	0,65	II
9	Maluku	Maluku Tenggara Barat	Maluku_Maluku Tenggara Barat	0,64	II
6	Kalimantan Tengah	Katingan	Kalimantan Tengah_Katingan	0,64	II
10	Maluku	Maluku Tenggara	Maluku_Maluku Tenggara	0,64	II
5	Kalimantan Tengah	Barito Utara	Kalimantan Tengah_Barito Utara	0,64	II
19	Riau	Kepulauan Meranti	Riau_Kepulauan Meranti	0,63	II
28	Sumatera Barat	Agam	Sumatera Barat_Agam	0,63	II
3	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	Kalimantan Tengah_Barito Selatan	0,62	II
24	Sulawesi Tengah	Donggala	Sulawesi Tengah_Donggala	0,59	II
29	Sumatera Barat	Muaro Sijunjung	Sumatera Barat_Muaro Sijunjung	0,54	II

Keterangan:

- Merah = prioritas I; skor 0,66 – 1,00
- Orange = prioritas II; skor 0,33 – 0,65
- Kuning = prioritas III; skor 0,00 - 0,32

Sumber: Hasil pengolahan data, 2014

KOMINFO

MATRIKS SINERGITAS PEMBANGUNAN BTS DI DAERAH BLANKSPOT

Identifikasi Teknis	Spesifikasi	Pembangunan			Keterangan	Operasional			Keterangan
		Kominfo	Pemda	Operator		Kominfo	Pemda	Operator	
Lahan	Luas : 20 x 20 meter persegi		v		Titik lokasi disepakati bersama operator dan pemda		v		Perlu pembebasan retribusi sampai masa waktu PKS dan community issue
Tower	SST 72 meter	v	v		Tergantung ketersediaan dana pemda dan kominfo melalui tower provider		v		
Perizinan	IMB dan retribusi, amdal, dll.		v				v		
SITAQ			v		Koordinasi Pemda dan Operator				
Power	Minimal 1500 VA		v		Genset akan dibantu oleh operator		v		Pemda menyediakan dan mengisi bahan bakar dan spare part genset
BTS	2G dan 3G			v	1 carrier 3G, 2 TRX 2G			v	
Sewa Transmisi		v				v			
CME		v	v		Dibarengi dengan pembangunan tower		v		
Site Keeper			v	v	Pemda menyiapkan sumber daya manusia dan operator memberikan pelatihan		v		Pemda menyediakan honor

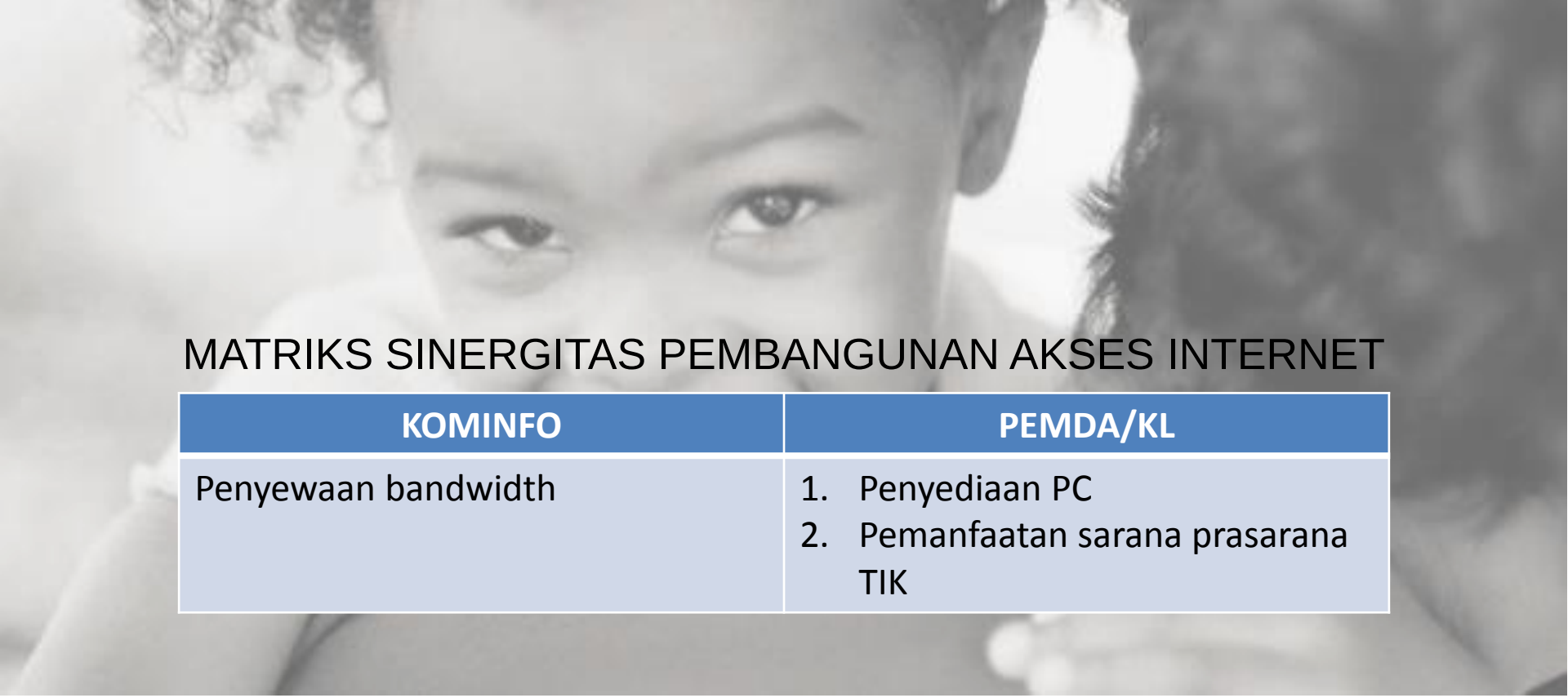

MATRIKS SINERGITAS PEMBANGUNAN AKSES INTERNET

KOMINFO	PEMDA/KL
Penyewaan bandwidth	1. Penyediaan PC 2. Pemanfaatan sarana prasarana TIK

MATRIKS SINERGITAS PEMBANGUNAN DUCTING BERSAMA

KOMINFO	PEMDA
Pembangunan Pilot Project	Pengoperasian ducting

KOMINFO

Sinergitas Ditjen PPI dan Pemda

1. Diperlukan forum komunikasi yang intensif dan terpadu antar Kominfo dan pihak Pemda terkait usulan penentuan lokasi USO;
2. Usulan kebutuhan infrastruktur yang disampaikan Pemda harus sejalan dengan RPJMN Pemerintah dan Renstra Ditjen PPI;
3. Diperlukan komitmen Pemda dalam menyiapkan infrastruktur pendukung dalam menjamin keberlangsungan program USO di daerah, seperti pengalokasian anggaran dalam APBD, ketersediaan lahan, tiang tower, PC, dll.

Tindak Lanjut Program KPU/USO

1. Finalisasi RPM USO dan RPM Struktur Organisasi BPPPTI;
2. Penyediaan BTS:
   a) Total usulan BTS yang sudah masuk per 4 Juni 2015 sejumlah 11 Provinsi , 312 desa
   b) Penawaran penyediaan BTS kepada operator;
   c) Telah ditandatangani MoU antara Menkominfo,Gubernur/Bupati (3 Gubernur : Kaltim, Kaltara, Kalbar)
   d) Provinsi LOKPRI diluar Kalimantan sedang proses koordinasi untuk penandatangan MoU antara Menkominfo dengan Gubernur /Bupati dan Operator;
   e) Dijadwalkan minggu ke-3 Bulan Juni mulai dilakukan survei lokasi.
3. Penyediaan jasa akses internet (bandwidth) kepada K/L dan Pemda :
   a) Penandatanganan MoU/Kerjasama
   b) Dukungan Pemda/ KL berupa PC terhadap lokasi yang sudah disulkan;
   c) Mengisi form survey internet;

TERIMAKASIH